

Konferensi Pers

Catatan Anggaran Kesehatan Tahun 2013

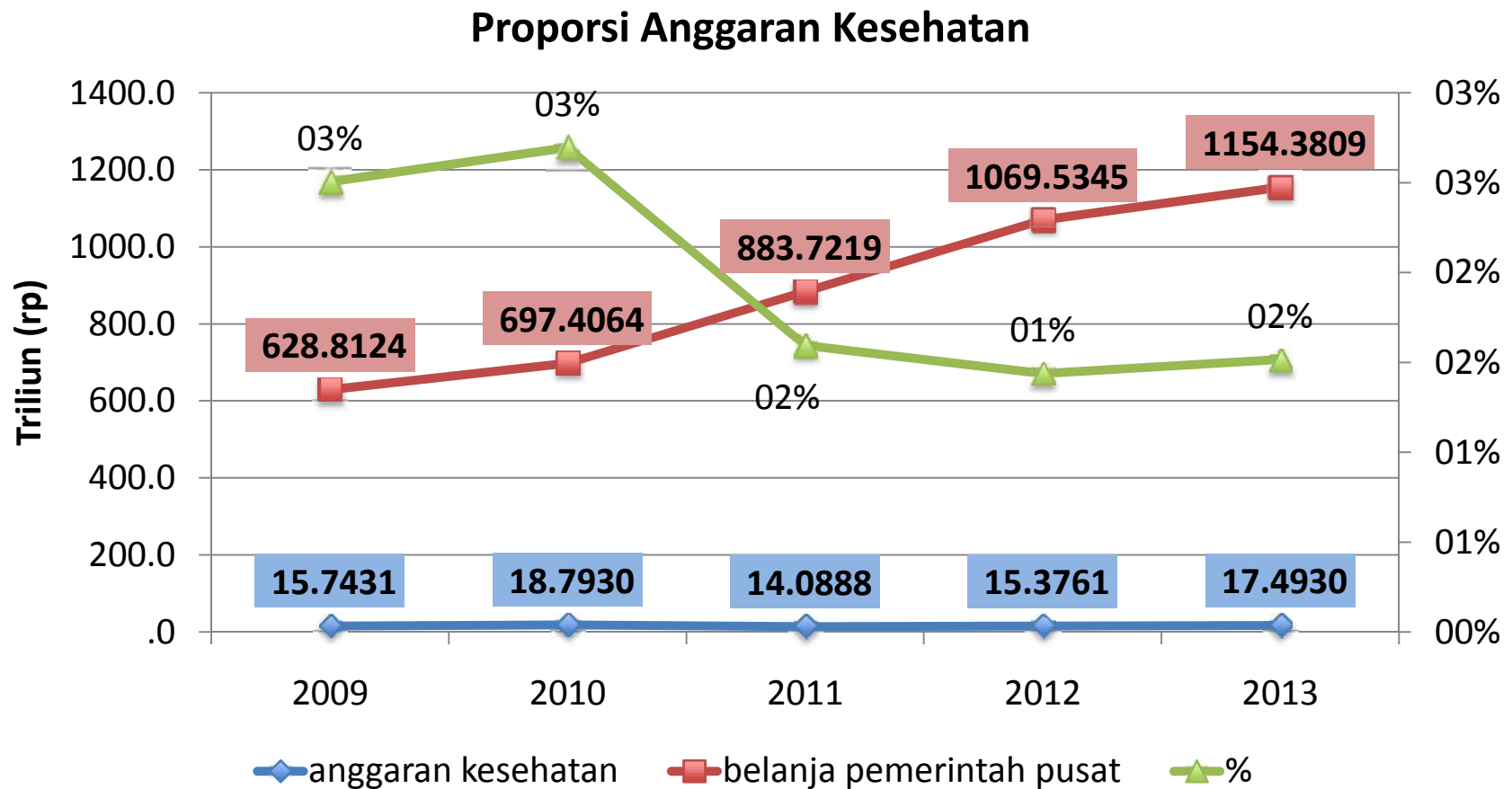
Dilema Anggaran Kesehatan

Maulana

Koord. Advokasi Seknas FITRA



Trend Anggaran Kesehatan tidak berbanding lurus dengan belanja pemerintah pusat. Kenaikan belanja pemerintah pusat tidak diikuti kenaikan anggaran kesehatan. Lantas kemana anggaran dialokasikan...?



Catatan Anggaran Kesehatan Tahun 2013

- **Pemerintah pusat tidak pernah serius** untuk menyediakan pelayanan kesehatan. Hal ini diindikasikan oleh minimnya anggaran kesehatan yang dialokasikan. Sejak diberlakukan UU No. 36/2009 tentang kesehatan, anggaran kesehatan hanya dianggarkan rata-rata 2% dari APBN. Padahal, UU Kesehatan mengamanatkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran kesehatan 5%.
- Di tahun 2013, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 17,5 Triliun yang artinya hanya 1,52% dari belanja pemerintah pusat yang dialokasikan Rp 1.154,3 Triliun.
- Bahkan untuk anggaran jamkesmas hanya dianggarkan Rp 6,7 Triliun, yang artinya menurun Rp 755 juta dibandingkan dengan tahun 2012 yang dialokasikan Rp 7,5 Triliun.

Buruk Rupa Kinerja Kementerian Kesehatan

- Di sisi lain, kementerian kesehatan yang bertanggungjawab menyediakan pelayanan kesehatan memiliki kinerja buruk. Setidaknya diindikasikan dari :
 - Pemborosan anggaran; tahun 2013, kementerian kesehatan menganggarkan pembelian kendaraan dinas sebanyak 265 unit senilai Rp 57,4 Milyar.
 - Kinerja anggaran;
 - opini BPK tahun 2009-2010 TMP, 2011 : WDP, 2012 : WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas)
 - Temuan BPK TA. 2011 : Kementerian Kesehatan menempati peringkat terbanyak kerugian negara dengan nilai Rp 91,7 miliar (7 kasus)
 - Anggaran sebesar Rp 284,9 miliar belum dipertanggungjawabkan.
 - Kinerja Pelayanan Kesehatan: (audit BPK 2012)
 - Program Jamkesmas tidak tepat sasaran → database kepesertaan tidak akurat
 - Anggaran jamkesmas tidak sesuai dengan jumlah masyarakat miskin

5 Kementerian dengan Nilai Kerugian Negara Terbesar

No	Kementerian	Kerugian Negara
1	kementerian kesehatan	91.707.950.000
2	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	16.454.380.000
3	Kepolisian Negara RI	15.015.990.000
4	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	13.990.040.000
5	Kementerian Perumahan Rakyat	10.030.220.000

Sumber : LHP BPK Smtr I 2012

5 Kementerian Berpotensi Merugikan Keuangan Negara

No	Kementerian	Rekomendasi belum ditindaklanjuti 2009-2013
1	Kementerian Keuangan	1.490.155.760.000
2	Kementerian Perhubungan	350.783.610.000
3	Kementerian Kesehatan	284.965.690.000
4	Kementerian Pendidikan	240.788.690.000
5	Kementerian Perumahan Rakyat	168.347.490.000

Sumber : LHP BPK Smtr I 2013

Rekomendasi

- Menuntut pemerintah untuk komitmen dalam peningkatan pelayanan kesehatan dengan melaksanakan mandat UU Kesehatan, 5% anggaran Kesehatan.
- Menuntut DPR, komisi IX untuk mengevaluasi kinerja kementerian kesehatan secara komprehensif, khususnya dalam hal kinerja anggarannya.